

PEMILIH PEMULA, “CERDAS PEMILU” BEGINNER ELECTOR, "SMART ELECTION"

¹Iwan Satriawan, Yordan Gunawan, King Faisal Sulaiman, M. Bima Aaron Hafiz

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹muhammadbimaaaron@gmail.com

Abstrak

Fokus utama pengabdian ini adalah mencerdaskan pemilih pemula dengan memberikan pengayaan materi pendidikan politik di kalangan siswa-siswi Madrasah Aliyah Muallimin dan Muallimat Yogyakarta sebagai kelompok sasaran dalam mengikuti pemilihan Presiden/Wakil dan para wakil rakyat di tahun 2019. Indikator bagi pemilih cerdas diasumsikan paling tidak : 1. Memahami jejak rekam para kontestan secara baik. 2. memahami visi-misi calon Presiden/Wakil, dan wakil rakyat dengan baik. 3. Memahami komitmen keberpihakan kontestan terhadap isu-isu kepentingan rakyat, isu anti korupsi dan non diskriminasi terhadap semua orang. 4. Mampu mengatasi isu/berita kampanye negatif (negative campaign) dan isu/berita hoax terhadap para kontestan. 5. Terinternalisasi sikap anti money politics, kesediaan untuk turut mengawasi terselanggaranya Pemilu yang jujur dan luber. Metode pendekatan berbasis partisipatif aktif dan interaktif dengan model ceramah, pelatihan, dan participatory learning/role playing disertai diskusi interaktif dan bedah kasus seperti kasus-kasus Hoax, money politics, dan negative campaign. Pola ini lebih menempatkan mitra sebagai mitra/partisipan aktif, dalam suasana kegiatan yang non formal/atraktif sehingga mampu menghasilkan serapan pengetahuan pendidikan politik yang mencedaskan. Terpenuhinya pemahaman dan perilaku pemilih pemula yang cerdas akan mendorong terwujudnya hasil Pemilu 2019 yang berkualitas dalam menghasilkan pemimpin dan para wakil rakyat yang amanah dan berjiwa negarawan.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pemilih Pemula, Cerdas Pemilu.

Abstract

The main focus of this service is to educate novice voters by providing enrichment of political education material among Madrasah Aliyah Muallimin and Muallimat Yogyakarta students as the target group in participating in the election for President / Deputy and representatives of the people in 2019. Indicators for intelligent voters are assumed to be at least: 1. Understand the track record of the contestants well. 2. understand the vision and mission of the candidates for President / Vice, and people's representatives well. 3. Understand the partitions of the contestants' commitment to issues of the people's interests, issues of anti-corruption and non-discrimination against all people. 4. Able to overcome negative campaign issues / news (negative campaign) and hoax issues / news against the contestants. 5. Internalized anti-money politics attitude, willingness to participate in supervising the implementation of fair and overflowing elections. Active and interactive participatory-based approach with lectures, training, and participatory learning / role playing models accompanied by interactive discussions and case reviews such as cases of hoaxes, money politics, and negative campaigns. This pattern places partners as active partners / partners, in an atmosphere of non-formal / attractive activities so as to result in an uptake of educational political knowledge. The fulfillment of the understanding and behavior of smart new voters will encourage the realization of quality 2019 election results in producing leaders and representatives of the people who are trustworthy and have statesmen spirit.

Keywords: Political Education, Beginner Voters, Election Intelligence.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden/Wakil dan para wakil rakyat dalam event Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2019, merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem demokrasi konstitusional. Setiap peserta dan partisipan Pemilu, berkewajiban untuk membangun kultur dan tatanan sistem demokrasi Pemilu yang mencerdaskan dan berkeadilan pada 17 April 2019. Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur, adil atau Jurdil, hanya akan menjadi dokumen hukum belaka jika tidak disertai pengetahuan pendidikan politik yang memadai seperti, (a) arti penting/implikasi Pemilu bagi keberlangsungan tata kelola pemerintahan dan negara; (b) pentingnya memahami jejak rekam para calon Presiden/Wakil dan calon anggota legislatif/wakil rakyat, dan (c) track record/perilaku partai politik kontestan yang menunjukkan

keberpihakan kepada rakyat. Batasan usia pemilih pemula dan isu hoax, *negative campaign*, atau money politics juga penting menjadi bagian dari materi pendidikan politik dimaksud. Kondisi inilah yang sesungguhnya dihadapi oleh para pelajar/siswa-siswi Madrasah Aliyah Muallimin dan Muallimat Yogyakarta sebagai mitra/kelompok sasaran penerima manfaat.

Para partisipan/mitra ini teridentifikasi selaku kelompok pemilih pemula atau yang sudah memiliki hak pilih namun masih terkategori massa mengambang (*floating mass*) yang rentan pengaruh praktek *money politics* dan ajakan Golput/tidak memilih. Pada dasarnya, mereka (mitra/partisipan) mempunyai animo partisipasi yang tinggi dalam pemilu 17 April 2019, namun tingkat kesadaran dan pengetahuannya masih rendah/minim terkait hukum pemilu yang baik. Pendidikan politik yang mencerdaskan di kalangan siswa-siswi Madrasah Aliyah

Muallimin dan Muallimat Yogyakarta sebagai kelompok sasaran penerima manfaat, merupakan langkah antisipatif agar mereka (siswa-siswi) yang terkategori sebagai pemilih pemula tersebut dapat menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab serta tidak mudah terjebak dalam praktik *money politics* atau golongan putih/Golput yang enggan menggunakan hak pilihnya karena alasan-alasan yang subjektif dan pragmatis.

Suara kelompok pemilih pemula menjadi sangat strategis dan signifikan dalam menentukan tingkat elektabilitas seorang calon Presiden/Wakil dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen (DPR, DPD dan DPRD). Dengan demikian, kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pendidikan politik yang cerdas bagi para pemilih pemula khususnya di kalangan pelajar Madrasah/SMA Mu'allimin dan SMA/Mu'allimat Yogyakarta agar tidak bias dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini sekaligus berkontribusi pada terwujudnya Pemilu 2019 yang Jurdil-Luber untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang peduli rakyat dan negarawan.

II. METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu. Lokasi pengabdian kemitraan ini dilaksanakan di Madrasah/SMA Muallimin dan Madrasah/SMA Muallimat Yogyakarta dan berlangsung selama tiga bulan yakni dari Januari, Februari dan Maret 2019. **Khalayak Sasaran.** Khalayak sasaran dalam kegiatan adalah para pelajar (siswa-siswi) Madrasah Aliyah Muallimin dan Muallimat Yogyakarta sebagai penerima manfaat. Kelompok sasaran ini sengaja dipilih dengan pertimbangan : (a) memiliki reputasi sebagai salah satu sekolah unggulan/favorit di Yogyakarta, para siswanya diasumsikan mempunyai kemampuan diatas rata-rata sehingga akan mudah memahami materi kegiatan, (b) merepresentasikan jumlah pemilih pemula dikalangan pelajar atau di sekolah-sekolah menengah atas (SMA/Madrasah Aliyah) se-Daerah Istimewa Yogyakarta, (c) partisipan masuk dalam kategori pemilih pemilu/yang sudah memiliki hak pilih namun masih terkategori massa mengambang (*floating mass*) yang rentan pengaruh money politik dan ajakan Golput/tidak memilih; (d) diasumsikan mempunyai animo partisipasi dalam pemilu 17 April 2019 tinggi, namun tingkat kesadaran dan pengetahuannya masih rendah/minim terkait hukum pemilu dan karenanya perlu, pendidikan politik yang mencerdaskan sesuai indikator/kategori yang telah dipetakan oleh Tim pelaksana kegiatan.

Metode Pengabdian

1. Tahap Awal Persiapan, yakni Tim melakukan koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak pimpinan MA Muallimin dan MA Muallimat Yogyakarta pada Minggu Pertama, Minggu Kedua, dan Minggu Ketiga bulan Januari 2019, untuk memastikan terselenggaranya kegiatan pengabdian dimaksud sesuai target dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya pada Minggu ke IV hingga bulan Maret 2019, Tim melakukan rangkaian rapat/meeting koordinasi-teknis-internal yang mencakup diantaranya : (a) melakukan rapat orientasi staf secara internal, (b) proses pendistribusian beban dan tanggung jawab kerja, (c) mempersamakan persepsi tentang dinamika kerja, (d) target yang ingin dicapai, (d)

penentuan tugas antar staf, termasuk (e) rapat penyiapan teknis kelengkapan acara/kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan. Pada Maret 2019 merupakan fase terakhir/klimaks dari pelaksanaan kegiatan pengabdian. Kelompok sasaran penerima manfaat yang sudah teridentifikasi, diasumsikan mereka belum memiliki pengetahuan dan tingkat kesadaran yang memadai mengenai pentingnya pendidikan politik yang mencerdaskan bagi pemilih pemula. Karenanya, materi dalam pelaksanaan kegiatan ini setidaknya mencakupnya : (a) arti penting/implikasi Pemilu bagi keberlangsungan tata kelola pemerintahan dan negara; (b) pentingnya memahami jejak rekam para calon Presiden/Wakil dan calon anggota legislatif, dan (c) track record/perilaku partai politik kontestan yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, (d) Batasan usia pemilih pemula dan isu hoax, *negative campaign*, atau *money politics*.

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk ceramah, pelatihan dan model *participatory learning* atau "*role playing*". Model penyampaiannya dikemas/dirangkai dalam suasana diskusi interaktif yang bersifat non-formal sehingga memacu keingintahuan para mitra/mitra/partisipan lebih maksimal dalam menggali materi-materi kegiatan. Dengan pendekatan "*role playing*" (*participatory learning*), para partisipan dibuat lebih santai dan atraktif dengan penyajian beberapa simulasi dan contoh-contoh kasus aktual/kontekstual terkait pendidikan politik yang baik bagi pemilih pemula.

Adapun teknik pelaksanaannya, meliputi: (a) identifikasi calon peserta dengan target tingkat partisipasi sebesar 80% dari total jumlah siswa/siswi di Madrasah Aliyah Muallimin dan Madrasah Muallimat Yogyakarta, (b) mengundang peserta yang telah teridentifikasi, (c) menyiapkan ATK kegiatan dan tempat kegiatan, (d) menyiapkan konsumsi meeting/acara (e) mengundang nara sumber/fasilitator, (f) ceramah pengantar diskusi/kegiatan dari yang mewakili pimpinan Madrasah Aliyah Muallimin/Muallimat, yang dipandu pembawa acara, (g) Penyampaian materi oleh narasumber/fasilitator, dan (h) diskusi langsung dengan alur interaktif/*participatory learning* antara para peserta/partisipan dengan narasumber (i) simpulan dan rekomendasi.

Indikator Keberhasilan. Sejumlah indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur, sebagai berikut : (a) pengetahuan akan hak-hak dasar kepeiluan sebagaimana dalam UU Pemilu/UUD 1945 makin meningkat (b) meningkatnya kesadaran hukum untuk menghindari praktik *money politics* dan isu *hoax*s termasuk kesadaran untuk menuntut hak-hak dasar politik-hukumnya yang terlanggar dan (c) meningkatnya angka partisipasi pada pemilu 17 April 2019.

Monitoring dan Evaluasi. Hal-hal yang dimonitoring dan dievaluasi (Monev) adalah keseluruhan progres pelaksanaan kegiatan dari tahap awal persiapan hingga akhir pelaksanaan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan evaluasi dan bahan laporan bulanan. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatoris. Setiap akhir kegiatan, partisipan dimintai pendapatnya mengenai dampak positif yang dirasakan oleh para partisipan termasuk memberikan masukan untuk kegiatan serupa dimasa mendatang dengan kelompok

sasaran/partisipan lain di kalangan pemilih pemula di lingkungan sekolah SMA/SMK/Aliyah di D.I. Yogyakarta. Hasil evaluasi partisipan akan dikomparasikan dengan hasil pengamatan staf terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mendapatkan jawaban-jawaban secara objektif. Dengan demikian stakeholders yang terlibat sebisa mungkin dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan ini.

Keberlanjutan. Diharapkan sejumlah gagasan/ide/kontribusi pemikiran yang lahir dari para partisipan/narasumber, dapat melahirkan desain program lanjutan yang lebih luas jangkauannya serta tidak terbatas pada pemilih pemula di kalangan pelajar. Melalui program ini, para partisipan/mitra akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan tidak apatis untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 dalam memilih Presiden/Wakil dan para wakil rakyat. Program ini bisa menjadi *rule of mudel/pilot project* dan bahkan para partisipan bisa menjadi kelompok katalisator, yang mendorong kelompok (calon partisipan) lain dikalangan pelajar di Yogyakarta untuk melibatkan diri atau melakukan kegiatan yang sama demi terwujudnya Pemilu 2019 yang Jurdil dan berkeadilan di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan PKM

1. Ceramah

Program Ceramah ini dibawakan oleh Tim Pengabdian sendiri, dan dibagi 2 sesi. Sesi 1 bertempat di Aula Asrama Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan materi dibawakan oleh bapak Dr. King Faisal Sulaiman S.H., LL.M dan hadir para pemilih pemula dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam sesi 1 ceramah ini, para pemilih pemula sangat antusias mengikuti program ini dan dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang berkaitan tentang Peran Pemilih Pemula dalam mewujudkan Pemilu yang Berkualitas.



Gambar 1. Kegiatan Ceramah di MA Muallimin Yogyakarta Program Ceramah sesi ke 2 dilaksanakan di Aula Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta dan dihadiri oleh siswi Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, materi ceramah dibawakan oleh bapak Yordan Gunawan S.H., M.H., Int.MBA. Dalam sesi 2 ceramah ini, para pemilih pemula sangat antusias mengikuti program ini dan dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang berkaitan tentang Peran Pemilih Pemula dalam mewujudkan Pemilu yang Berkualitas.

Target dari program ceramah ini adalah bagaimana mitra pemilih pemula dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta mengerti bagaimana cara menjadi pemilih pemula “cerdas pemilu” dalam menghadapi pemilihan umum, misalnya bagaimana generasi muda menghadapi *hoax* dan *negative campaign*. Program ceramah ini juga difungsikan sebagai ajang diskusi berkaitan dengan persoalan-persoalan seputar kepemiluan dan problem kepemiluan, sekaligus mencari solusi terhadap persoalan tersebut (peran terbaik Pemilih Pemula) demi terciptanya Pemilihan Umum yang berkualitas yang menghasilkan Pemimpin dan Anggota Legislatif yang Amanah, Jujur, dan Berkualitas.



Gambar 2. Program Ceramah di MA Muallimat Yogyakarta

2. Pelatihan

Program pelatihan dalam pengabdian masyarakat dikembangkan dengan metode yang lebih sederhana, yaitu dengan menyelenggarakan sarasehan dan diskusi santai / informal sehingga para pemilih pemula tidak terlalu berat dalam menerima materi-materi pelatihan. Materi-materi pelatihan yang disampaikan mengambil beberapa kasus kepemiluan, sehingga peserta pelatihan akan memperoleh gambaran-gambaran kasus dan strategi yang seharusnya dilakukan. Selain itu, juga sharing pengalaman merupakan syarat untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi pemilih pemula dan menjadi penentu pelaksanaan kegiatan dalam menciptakan pemilih pemula yang cerdas dan menolak *money politics*.¹ Metode pelatihan dengan diskusi informal bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perhatian peserta yang lebih intens.

Pada kegiatan pelatihan ini, selain diisi oleh ketua tim pengabdian, yaitu Iwan Satriawan S.H., MCL., Ph.D, juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta yaitu Ibu Siti Nurhayati, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Yogyakarta. Program pelatihan ini dilaksanakan di aula Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta dan dihadiri ratusan pemilih pemula dari Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta yang sangat antusias untuk menjadi Pemilih Pemula, Cerdas Pemilu.

Pada kegiatan pelatihan ini, para pemilih pemula diajak menjadi Pemilih Pemula, Cerdas Pemilu demi terciptanya Pemilu yang sehat, berkualitas, *anti-hoax dan negative campaign* demi terciptanya pemimpin yang berkualitas, amanah, dan mensejahterakan rakyat. Pelatihan ini juga membagikan poster yang bertuliskan jargon agar pemilih pemula untuk tidak golput pada Pemilu nanti dan agar menjadi pemilih pemula yang cerdas Pemilu.



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Pemilih Pemula, Cerdas Pemilu



Gambar 4. Pemateri dan Peserta Memegang Poster

4. Role Playing

Dalam program ini, para pemilih pemula memainkan peran sebagai elemen-elemen yang terlibat dalam Pemilihan Umum melalui metode "role playing" yang menuntut keterlibatan peserta secara aktif dalam simulasi pelaksanaan Pemilihan Umum. Tujuan metode ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab konstitusional sebagai warga negara dalam Pemilihan Umum.



Gambar 5. Kegiatan Role Play

Pada kegiatan ini, para pemilih pemula dibagi menjadi 2 kelompok dan diberi waktu untuk menentukan pemimpin dari masing-masing kelompok, dalam menunjukan pemimpinnya para peserta memilih orang terbaik di antara yang lain dan memilih berdasarkan prestasi dan kepribadian sehingga terpilih 2 pemimpin terbaik dari tiap kelompok yang berisikan para pemilih yang cerdas. Diharapkan, pada Pemilu nanti, para pemilih pemula memilih pemimpin dan calon anggota legislatif dengan

cara yang cerdas, bukan dengan *money politics*, *hoax* dan *negative campaign*.

VI. KESIMPULAN

Rangkaian kegiatan sejak tahap awal persiapan, monitoring dan evaluasi hingga proyeksi keberlanjutan diharapkan akan terjadi peningkatan kapasitas/pengetahuan kepolitan yang baik oleh kelompok penerima manfaat/partisipan (mitra) yang terkategori sebagai pemilih pemula tersebut. Dengan demikian, akan terbangun kesadarannya (partisipan) untuk dapat menggunakan/memperjuangkan hak-hak politik pemilu secara bertanggungjawab sebagaimana dijamin UU Pemilu/konstitusi (UD 1945). Partisipan juga dengan sendirinya akan menyadari, betapa pentingnya pendidikan politik yang mencerdaskan agar tidak mudah terjebak dalam praktik politik uang (*money politic*) dan ajakan Golput. Partisipan juga akan mengenali secara mendalam jejak rekam, berikut visi misi, dan komitmen politik, keberpihakan para calon kontestan Pemilu terhadap kepentingan rakyat. Kesadaran demikian diikuti pula dengan kemampuan mengatasi *black campaign/negative campaign* termasuk merepson isu/berita hoaks yang tidak mendidik dan mencerdaskan.

Melalui program ini, para kelompok sasaran akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan tidak apatis untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 untuk memilih Presiden/Wakil dan para wakil rakyat. Keberlanjutan program ini (pendidikan politik yang mencerdaskan) menjadi langkah prioritas yang harus didorong oleh semua stakeholder bangsa termasuk pihak perguruan tinggi dan penyelenggara pemilu. Program ini dapat menjadi *rule of mudel* atau *pilot project* dimana para partisipan, diharapkan akan menjadi katalisator, mendorong kelompok (calon partisipan) lainnya dan tidak terbatas di kalangan pelajar di Yogyakarta untuk melibatkan diri atau melakukan hal yang sama demi terwujudnya Pemilu yang Jurdil dan berkeadilan di Indonesia dimasa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam pengabdian ini menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pihak Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pemberi dana hibah pengabdian Tahun 2019, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muallimin dan Madrasah Aliyah Muallimat Yogyakarta, para siswa/siswa partisipan, serta semua pihak lain terlibat dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bisariyadi, et.al. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, September 2012.
- David Bentham dan Kevin Boyle. (2000). *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- [2] Hayat, H. (2014). Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 468-491.
- Hanan, D. (2016). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13, Hal. 1451-1475.

- [3] Janedjri M.Gaffar, 2012, Politik Hukum Pemilu, Jakarta, Konstitusi Press (Konpress), hlm. 29
- [1] Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009) hlm. 416.
- [4] Kesi Widjajanti, Model Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011.
- [5] King Faisal Sulaiamn, *Politik Hukum Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- [6] Khairul Fahmi, “*Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Legislatif*”. Jurnal Konstitusi, Vol 7, Nomor 3, Juni 2010
- [7] Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal 461.
- Novembri Yusuf Simanjuntak, “*Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*”, Vol 3, Nomor 3, Tahun 2017.
- [8] Sri Hastuti P, “*Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*”, Jurnal Hukum, Vol 11, Nomor 25 Tahun 2004
- [9] Sitepu, P.A. (2012). Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [10] Shubhan, H. (2006). Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol. Jurnal Konstitusi, 3(4), 3057.
- [11] Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). Merancang Sistem Politik Demokratis Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- [12] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- [13] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- [14] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- [15] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan
- [16] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),
- [17] “Kemenkominfo: Ada 1000 Berita Hoax Selama Masa Kampanye Pemilu”, diunduh dari <https://news.detik.com/berita/4264513/kemenkominfo-ada-1000-berita-hoax-selama-masa-kampanye-pemilu>. www.kpu.go.id